

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Buku:

- Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Dadang Sundawa. 2008. *Hukum Perdata dan Acara Perdata*. Edisi 2. Universitas Terbuka Press. Tangerang Selatan.
- Hadi Supriyono dan Djoko Subandrijo. 2017. *COLREG 1972 Dan Dinas Jaga Anjungan*. Deepublish. Yogyakarta.
- Harsanto Nursadi. 2007. *Sistem Hukum Indonesia*. Penerbit Universitas Terbuka. Jakarta.
- Hasim Purba. 2005. *Hukum Pengangkutan Di Laut Perspektif Teori dan Praktek*. Pustaka Bangsa Press. Medan.
- HMN. Purwosujipto. 1981. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jilid 3. Djambatan. Jakarta.
- M. Husseyn Umar. 2008. *Negara Kepulauan Menuuju Negara Maritim (Bab 14 : Nenerapa Catatan Atas UU No. 17/2008)*. Ind-Hilco. Jakarta.
- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Dagang Dalam Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*. CV. Nata Karya. Ponorogo.
- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Edisi Pertama. Nata Karya. Ponorogo.
- Muhammad Shoim. 2022. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Rafi Sarana Perkasa. Semarang.

R. L. Harris. 2019. *An Introduction to the Law of Torts*. Sweet & Maxwell.
London.

Ridwan Khairandy. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Cetakan I.
FH UII Press.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan
Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.

Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan
Singkat"*. Rajawali Pers. Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1981. *Hukum Perdata: Hukum Benda*.
Liberty. Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra
Aditya Bhakti. Bandung.

Wirjono Prodjodikoro. 1984. *Hukum Laut Bagi Indonesia*. Sumur Bandung.

Zainal Asikin. 2013. *Hukum Dagang*. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan
Pengusaha Angkutan Laut.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

Putusan Pengadilan Negeri No: 6/Pdt.G/2021/PN Pbl.

Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.212./14/IX/MP.2022 Tentang Kecelakaan Kapal Tuburukan Antara KM Jala Karya Sukses Abadi dengan KM Sanjaya Fisherindo Di Sekitar Perairan Laut Banda-Maluku

C. Jurnal-Jurnal dan Sumber lainnya:

Annisa. N. & Nurbaiti. S.. 2020. *“Tanggung Jawab Pengangkut Atas Musnahnya Barang Akibat Tenggelamnya Kapal KLM Pulau Bontong Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Kasus: Putusan Nomor 804/Pdt. G/2017/Pn Jkt. Sel)”*. Jurnal Hukum Adigama. Jul. Vol. 3.. No. 1.

Dewi Indira Biasane. 2017. *Penerapan Regulation for Prevention Collisions at Sea (COLREG 1972) pada Kapal Berbendera Indonesia di Pelabuhan Bitung*. Jurnal Penelitian Transportasi Laut. Balitbanghub. Jakarta.

Irnaldi Rahim Wijaya. 2023. Analisis Perubahan UU No17 tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. *“Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme*

Hukum". Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum. Vol. 1, No. 01, Universitas Diponegoro. Semarang.

Rahmadita. N. A.. & Nurbaiti. S. 2019. "*Tanggung Jawab Pengangkut Kepada Pemilik Barang Dalam Peristiwa Tubrukan Kapal Antara KM. Dewaruci Perkasa Dengan KM. Dolphin Nusantara dan KM. Trijaya Lestari Di Alur Pelayaran Barat Surabaya*" (Studi Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor Hk. 210/3/I/Mp. 18). Jurnal Reformasi Hukum Trisakti. Vol. 1. No. 1.

Silvi Fajar Karunia. 2021. *Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Pelayaran Terhadap Barang Angkutan Atas Peristiwa Kecelakaan Kapal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Islam Malang.

